



RESPONS INTERNASIONAL PADA PELARIAN ETNIS ROHINGYA KE BANGLADESH

Sita Hidriyah*)

Abstrak

Ratusan warga etnis Rohingya mengungsi ke Bangladesh untuk menghindari konflik di Rakhine, Myanmar pada 10 hingga 18 November 2016. Para warga melarikan diri melintasi perbatasan untuk menghindari tentara Myanmar yang telah membunuh warga sipil dan membakar desa. Dugaan terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) oleh tentara keamanan, merupakan ujian terbesar pemerintahan Aung San Suu Kyi (Suu Kyi) yang masih terbilang baru. Respons internasional dibutuhkan untuk dapat memberikan solusi serta peringatan kepada Myanmar agar bersikap tegas dan peduli terhadap kasus etnis Rohingya yang terjadi sejak lama. Sebagai negara demokrasi yang menjunjung HAM, Indonesia berkomitmen membantu penanganan pengungsi dan mendorong upaya penyelesaian konflik. Pemerintah Myanmar diharapkan dapat menyelesaikan masalah kemanusiaan yang berkaitan dengan etnis Rohingya sehingga konflik yang terjadi tidak semakin meluas dan menjadikan ASEAN sebagai wilayah yang aman.

Pendahuluan

Kasus kekerasan terhadap etnis Rohingya kembali mencuat di akhir November 2016. Kali ini yang terjadi di wilayah Rakhine adalah pembakaran desa-desa dan pembunuhan warga sipil yang disebabkan adanya serangan terhadap pos-pos polisi yang menewaskan sembilan polisi Myanmar pada bulan Oktober 2016. Lebih dari 30.000 warga etnis Rohingya terpaksa melarikan diri dari tempat tinggal mereka. Sebagian besar mencoba melarikan diri ke Bangladesh meski negara tersebut telah memperketat patroli perbatasan. Lebih dari 2.000 orang diperkirakan

telah menyeberang perbatasan, meskipun dilakukan pengamanan ketat di perbatasan Myanmar-Bangladesh. Sementara, penjaga perbatasan Bangladesh telah mencegah lebih dari 1.000 pengungsi masuk ke negara mereka.

Myanmar tengah berusaha melakukan operasi pembersihan etnis Rohingya. Kejadian ini disertai dengan penembakan oleh tentara Myanmar terhadap warga desa yang mencoba melarikan diri. Berbagai informasi soal kondisi terbaru di Rakhine simpang siur karena media internasional tidak diberikan akses untuk masuk ke negara

*) Peneliti Muda Masalah-masalah Hubungan Internasional pada Bidang Hubungan Internasional, Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI. Email: sita.hidriyah@dpr.go.id



bagian Myanmar yang berbatasan dengan Bangladesh tersebut.

Tragedi kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingya sedikit berbeda dengan tahun sebelumnya. Jika pada tahun 2015, mereka meninggalkan Myanmar karena situasi di Myanmar yang sama sekali tak kondusif akibat konflik dengan kelompok di Rakhine yang beragama Buddha. Saat itu sejumlah kawasan di Myanmar, seperti Negara Bagian Rakhine diguncang kerusuhan berlatar sentimen sektarian dari kalangan mayoritas warga Buddha terhadap warga minoritas Rohingya yang beragama Islam. Situasi tersebut masih terjadi, namun kali ini pelariannya dipicu oleh bentrok bersenjata dengan tentara pemerintah. Atas apa yang terjadi, Myanmar diharapkan peduli dengan etnis Rohingya dengan mendorong demokrasi di negaranya, sehingga hak etnis Rohingya di negaranya sendiri dapat dipulihkan. Tulisan ini akan mengulas bagaimana respons Indonesia dan internasional atas kasus kekerasan yang menimpa etnis Rohingya di Rakhine, Myanmar hingga melarikan diri ke Bangladesh.

Bentrok Bersenjata Warga Sipil dan Militer Myanmar

Pemerintah junta militer Myanmar masih menerapkan politik diskriminasi terhadap suku-suku minoritas di Myanmar. Diskriminasi tersebut dilakukan termasuk kepada etnis Rohingya sejak tahun 1990 sampai saat ini. Rakhine yang menjadi rumah bagi sekitar 1,1 juta warga minoritas Rohingya, telah dilanda gelombang kekerasan etnis sejak tahun 2012. Saat itu, lebih dari 100 orang tewas dalam berbagai bentrokan antara warga mayoritas Buddha dan warga minoritas Rohingya. Konflik itu juga menyebabkan puluhan ribu etnis Rohingya tinggal di kamp-kamp pengungsi. Walaupun para aktivitis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Rohingya menuduh pihak kepolisian dan kekuatan militer turut berperan serta dalam kekerasan dan menangkap warga etnis Rohingya, tetapi penyelidikan oleh organisasi *International Crisis Group* melaporkan bahwa kedua belah pihak baik polisi dan militer mendapatkan perlindungan dan keamanan dari negara.

Bentrokan bersenjata pada Oktober 2016 lalu terjadi kembali. Sekitar tiga puluh

pemberontak etnis Rohingya tewas selama pertempuran dua hari dengan militer Myanmar. Wilayah utara Rakhine merupakan kawasan yang menjadi target operasi militer Myanmar, sejak terjadi serangan di pos perbatasan yang menewaskan sembilan polisi Myanmar Oktober 2016.

Pernyataan militer Myanmar mengatakan dua puluh dua penyerang bersenjata tewas dekat desa Dar Gyi Zar pada Minggu 13 November 2016 setelah bentrok bersenjata dengan militer Myanmar. Selain itu, enam pemberontak lainnya tewas dalam bentrokan di tempat lain di negara bagian yang sama.

Jalan Pelik Menyelesaikan Masalah Etnis Rohingya

Menyelesaikan masalah etnis Rohingya tidak mudah. Berbagai kendala harus dihadapi mengingat kompleksnya konflik tersebut karena mencakup permasalahan agama, politik, dan ekonomi. Pada bulan Maret 2015, pemerintah Myanmar mencabut kartu identitas penduduk bagi orang-orang Rohingya yang menyebabkan mereka kehilangan kewarganegaraannya dan tidak mendapatkan hak-hak politiknya. Hal inilah yang menyebabkan etnis Rohingya mengungsi ke Thailand, Malaysia, dan Indonesia.

Etnis Rohingya dianggap sebagai etnis yang paling teraniaya di dunia. Pasalnya penolakan Myanmar untuk memberikan kewarganegaraan membuat etnis Rohingya terdiskriminasi. Jumlah warga muslim Rohingya diperkirakan mencapai satu juta. Penolakan oleh Bangladesh dan Myanmar membuat etnis Rohingya hidup tanpa kewarganegaraan. Selama ini, pemerintah Myanmar menganggap masalah etnis Rohingya yang mengungsi ke Indonesia, Thailand, dan Malaysia merupakan persoalan perdagangan manusia. Pemerintah Myanmar menolak disalahkan atas kasus etnis Rohingya. Menurut pemerintah Myanmar, tidak ada bukti bahwa etnis Rohingya adalah warga asli Myanmar. Myanmar menganggap mereka sebagai imigran ilegal dari Bangladesh, padahal etnis Rohingya sudah ada di Myanmar selama beberapa generasi. Akibat hidup tanpa kewarganegaraan, etnis Rohingya sulit beraktivitas seperti warga lainnya.

Kemenangan partai oposisi Myanmar *National League for Democracy* pimpinan Suu Kyi pada akhir 2015, sebenarnya

diharapkan mampu membawa perubahan signifikan atas masalah kemanusiaan Rohingya. Namun nyatanya diperlukan tekanan internasional terhadap Myanmar untuk menghentikan kekerasan, diskriminasi, dan pengusiran terhadap etnis Rohingya. Kejadian-kejadian yang telah terjadi memunculkan hambatan besar bagi ASEAN untuk menjadikan kawasan regional ini sebagai kawasan yang aman, terintegrasi, serta saling mendukung.

Respons Internasional

Negara-negara Barat semakin khawatir dengan cara pemerintah Suu Kyi mengatasi kekerasan di Myanmar. Utusan Amerika Serikat (AS) untuk Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) memperingatkan bahwa penyelenggara negara tidak bisa sendiri dalam menangani krisis sosial. Sementara Duta Besar AS untuk PBB, Samantha Power, menyampaikan kepedulian pada pertemuan tertutup Dewan Keamanan PBB yang diadakan atas permintaan AS, di markas PBB di New York pada 17 November 2016. Antusiasme awal masyarakat internasional yang membiarkan Myanmar untuk terus sendiri di jalan reformasi, tampaknya berbahaya pada tahap ini. Bahkan Suu Kyi mengatakan bahwa negaranya sedang diperlakukan tidak adil. Akan tetapi Myanmar yang telah berkomitmen untuk memulihkan akses bantuan dan meluncurkan penyelidikan atas dugaan pelanggaran hak asasi, menjadi poin-poin penting yang mereka tegaskan untuk diatasi.

Pemimpin Negara Myanmar yang juga peraih hadiah Nobel Perdamaian, Suu Kyi, selama bertahun-tahun telah dinilai Barat sebagai pejuang demokrasi. Kemenangannya dalam pemilihan umum pada tahun lalu pada platform reformasi juga dipuji secara meluas. Kelompok hak asasi telah berulang kali mendesak Suu Kyi membuat solusi bagi minoritas etnis Rohingya. Tetapi kelompok nasionalis Budha menentang upaya memberikan kewarganegaraan bagi etnis Rohingya, karena kelompok ini dinilai hanyalah imigran ilegal dari Bangladesh. Dengan adanya krisis saat ini, terjadinya pertumpahan darah yang paling serius di Rakhine sejak bentrokan komunal pada 2012 telah melahirkan kecaman internasional, bahwa Suu Kyi sebagai pemimpin negara maupun tokoh perdamaian, terlalu sedikit

melakukan perannya untuk meringankan penderitaan etnis Rohingya

Selain respons dari PBB, LSM-LSM Malaysia mendesak organisasi internasional seperti PBB dan ASEAN, untuk memainkan peran yang lebih aktif dalam menangani kekerasan dan kekejaman yang dialami etnis Rohingya. Presiden Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Malay Islamic World, Mohd Ali Rustam mengatakan bahwa pemerintah Myanmar bertanggung jawab untuk melindungi rakyat mereka, tak peduli muslim atau bukan. Sementara dari pemerintah Malaysia sendiri telah menyerukan protes besar terhadap Myanmar yang digelar pada 4 Desember 2016 dan dihadiri Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak.

Indonesia turut merespons adanya kasus kekerasan etnis Rohingya. Pada 21 November 2016, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu), memanggil Duta Besar Myanmar di Jakarta. Menlu Retno yang telah berkomunikasi dengan mitranya, Menteri Muda Urusan Luar Negeri Myanmar berbagi pengalaman sekaligus mendorong untuk menyelesaikan persoalan kekerasan di Rakhine dan pengembangan serta pembangunan yang inklusif di Rakhine. Selain itu pada 6 Desember 2016, Menlu Retno berangkat ke ibukota Myanmar untuk bertemu Suu Kyi sebagai rangkaian upaya intensif yang dilakukan diplomasi Indonesia dalam membantu penyelesaian masalah di Rakhine. Menlu dan wakilnya, sebelumnya telah menjalin komunikasi dengan berbagai LSM internasional serta organisasi masyarakat terutama ormas Islam di Indonesia untuk meminta saran.

Diplomasi Indonesia tidak pernah berhenti bekerja. Pemerintah Indonesia sudah bekerja sama dengan Myanmar sejak sebelum pemerintahan yang baru. Indonesia melakukan *capacity building* untuk isu yang terkait dengan *good governance*, demokrasi, hak asasi manusia, hingga desentralisasi. Termasuk juga yang berkaitan dengan keamanan, kesehatan, dan kesejahteraan di Rakhine. Langkah konkret yang telah dilakukan antara lain pembangunan empat sekolah Indonesia di Rakhine. Di forum internasional, Indonesia terlibat aktif dalam *Organization of Islamic Cooperation (OIC) Contact Group on Rohingya*. Kemudian,

Indonesia juga aktif menjadi bagian dari *Partnership for Myanmar* yang dikelola PBB. Kerja sama tersebut melibatkan pemerintah Myanmar. Selama ini Indonesia telah melakukan rangkaian bantuan kepada etnis Rohingya di Myanmar yang bertujuan untuk menegakkan misi kemanusiaan dan mewujudkan perdamaian. Langkah pertama yang dilakukan adalah membahas masalah ini secara multilateral maupun regional untuk mendapatkan penyelesaian yang baik. Langkah yang kedua, Indonesia mengusulkan pada pemerintah Myanmar untuk mengundang badan PBB atau diplomat asing dan juga negara yang tergabung dalam organisasi kerja sama Islam untuk melihat kondisi sebenarnya sehingga ada opini yang seimbang berdasarkan situasi yang sebenarnya terjadi.

Respons lain atas kasus etnis Rohingya juga ditunjukkan oleh masyarakat Indonesia yang melakukan unjuk rasa di Kedutaan Besar Myanmar di Indonesia pada 25 November 2016. Mereka mendesak Pemerintah Indonesia untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Myanmar serta menuntut agar hadiah Nobel Perdamaian yang telah diterima Suu Kyi dari Komite Nobel Perdamaian di tahun 1991 dicabut. Seruan tersebut juga dinyatakan oleh Komnas HAM Indonesia karena Suu Kyi dianggap tidak melakukan upaya optimal dalam mendukung terciptanya perdamaian dan persaudaraan antar-sesama mengingat ia memegang posisi yang cukup strategis di Pemerintahan Myanmar sebagai *State Counsellor* atau Penasihat Negara. Melalui diplomasi, Indonesia secara konsisten berusaha agar konflik komunal yang mengakibatkan permasalahan kemanusiaan terhadap etnis Rohingya benar-benar ditangani dan diselesaikan secara bijak, adil, tepat, dan tuntas.

Penutup

Permasalahan etnis Rohingya telah menjadi masalah sedemikian kompleks yang melibatkan beberapa negara terutama Negara berdekatan dengan Myanmar seperti Bangladesh. Harapan kepada Suu Kyi untuk dapat mendorong demokrasi Negara Myanmar diharapkan bisa mengangkat harkat warga muslim Myanmar khususnya etnis Rohingya yang telah mengalami penderitaan selama puluhan tahun, seperti

menghilang, karena belum terselesaikannya permasalahan tersebut.

DPR dapat mendorong Pemerintah Indonesia dan negara-negara yang tergabung dalam ASEAN untuk membahas masalah kemanusiaan dengan pemerintah Myanmar. Namun isu Rohingya seharusnya akan rampung jika penyelesaian permasalahannya yaitu di tangan pemerintah Myanmar sendiri. Apabila pemerintah Myanmar tidak netral dalam mendorong rekonsiliasi, penyelesaian permasalahan tidaklah akan berhasil. Semua pihak yang terlibat pada konflik Rohingya di Rakhine perlu meredakan ego masing-masing agar diskriminasi tidak terjadi sehingga konflik dapat dihindari dan transisi demokrasi dapat berjalan baik.

Referensi

- “Arti Menjadi Mitra Sejati”, *Kompas*, 27 November 2016.
- “Bangladesh Kembali Tolak Pengungsi Rohingya”, *Republika*, 30 November 2016.
- “Bentrok Bersenjata di Myanmar, Puluhan Minoritas Rohingya Tewas”, <https://m.tempo.co/read/news/2016/11/14/118820031/bentrok-bersenjata-di-myanmar-puluhan-minoritas-rohingya-tewas>, diakses 30 November 2016.
- “Dunia Kecam Keras Myanmar”, *Kompas*, 26 November 2016.
- “Komnas HAM Desak Pemerintah Indonesia Respon Tragedi Rohingya”, <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2016/11/24/47/komnas-ham-desak-pemerintah-indonesia-respon-tragedi-rohingya.html>, diakses 30 November 2016.
- “Kronologi Lengkap Kekerasan Terhadap Muslim Rohingya di Myanmar”, <https://www.merdeka.com/dunia/ini-kronologi-lengkap-kekerasan-terhadap-muslim-rohingya-di-myanmar.html>, diakses 29 November 2016.
- “Militer Myanmar Kembali Serang Etnis Rohingya”, <http://www.dw.com/id/militer-myanmar-kembali-serang-etnis-rohingya/a-36477718>, diakses 30 November 2016.